

MOTIVASI AUSTRALIA MELAKUKAN KERJA SAMA DI BIDANG INFRASTRUKTUR DENGAN ASEAN PADA TAHUN 2018

By: Mega Zulvia

Email: megazulvia98@gmail.com

Supervisor: Dr. Yessi Olivia, S.IP., M.Int.Rel

Bibliography: 32 Journal Articles, 12 Books, 36 Other Media

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru - Riau 28293

Telp: (0761) 63266/Fax: (0761) 63279

Abstract

The purpose of this research is to explain the motivation of Australia to pursue collaboration with ASEAN on infrastructure. In early 2018, ASEAN held its first summit in Sydney, Australia. This summit resulted with an agreement between Australia and ASEAN to improve infrastructure development in the ASEAN countries. This is an interesting topic to research because this summit was the first ASEAN's event held in Australia. To explain Australia's motivation, this research examines Australia's interest in the Asia Pacific region and focuses on Australia's engagement with ASEAN.

The research uses a qualitative method with document analysis technique. Data for this research is taken from books, scientific journals, magazines, newspapers, and the Internet. The research built on the perspective of neorealism in the study of International Relations which assume that the structure of the international system influences the behavior of states. This research uses the nation-state level analysis, and applies the balance of power theory, in particular hedging strategy to analyze Australia's interest in pursuing cooperation with ASEAN.

This study shows that Australia's motivation to collaborate in the infrastructure sector with ASEAN in 2018 is part of Australia's strategy to balance China's growing influence in the Asia Pacific region. That Australia's strategy can be interpreted as a form of hedging strategy, which Australia balances the power through their infrastructure cooperation relationship with ASEAN in a situation full of uncertainty and risk due to the strengthening of China's influence in the Asia Pacific region. In addition, the anticipation of the rise of China's power was carried out by Australia by carrying out the Indo-Pacific strategy which was stated directly in Australia's Defense White Paper in

2013, with the implementation of Southeast Asia as the geographic center of the Indo-Pacific region. Australia's implementation of the Indo-Pacific strategy uses instruments such as ASEAN and the EAS to shows the important role of Indo-Pacific engagement in ASEAN

Keywords: Australia, ASEAN, international cooperation, hedging strategy, motivation

PENDAHULUAN

Australia dan Asia Tenggara merupakan kawasan yang berada di wilayah Asia Pasifik. Wilayah Asia Pasifik sendiri merupakan wilayah yang meliputi wilayah Samudera Hindia, Samudera Pasifik, Benua Asia Daratan, Asia Tenggara dan Benua Australia, dan meliputi negara-negara maju seperti Cina, Jepang, India, Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), serta Kanada.¹ Asia Tenggara sendiri merupakan kawasan penting bagi Asia Pasifik, karena letaknya yang strategis. Asia Tenggara berada di posisi terbentang di persimpangan dua jalur laut terbesar di dunia, yang pertama adalah jalur Timur-Barat, yang merupakan jalur yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik. Yang kedua adalah jalur Utara-Selatan, yang merupakan jalur yang menghubungkan kawasan Asia Timur dengan Australia dan Selandia Baru serta pulau-pulau disekitarnya.²

Australia merupakan negara yang memiliki letak geografis berdekatan dengan negara-negara di Pasifik Selatan dan Asia Tenggara. Australia sendiri berada di lingkungan negara-negara yang berbeda secara sosial, kultural, ras, etnis dan adat kebudayaan dengan Australia. Faktor tersebut menjadi penyebab Australia disebut sebagai *misplaced continent* atau *frightened country*, dimana pelaksanaan sistem pemerintahan Australia yang mengarah ke Eropa, namun secara geografis letak Australia berada pada lingkaran masyarakat yang berbeda, seperti kawasan Asia Pasifik. Dalam kenyataan seperti ini, mengharuskan Australia untuk menata kehidupan politik

¹SyahroniAlby, Umi Oktyari Retnaningsih, Yusnarida Eka Nizmi, "Strategi ASEAN Menghadapi Kekuatan Amerika Serikat dan China di Kawasan Indo-Pasifik", *Journal Publicuho*, Vol. 4 No. 1 February-April 2021, hal. 27-38.

²Dewi Triwahyuni, "Signifikansi Kawasan Asia Tenggara dalam Kepentingan Amerika Serikat", *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 9 No. 1, hal 35-37.

luar negerinya dengan mempertimbangkan *good neighbourhood* dengan negara-negara sekitarnya.³ Letak geografis Australia yang berada di dekat negara-negara dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tersebut menciptakan kedekatan yang mengakibatkan adanya integrasi yang terjalin antara Australia dengan ASEAN.

ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) sebagai organisasi regional kawasan yang mewadahi kerja sama 10 negara di Asia Tenggara merupakan mitra strategis Australia dalam hal geopolitik. Australia merupakan negara pertama yang ditetapkan ASEAN sebagai mitra kerja samanya. Tepatnya, pada bulan Januari dan Februari 1974.⁴ Hubungan kerja sama ASEAN dan Australia dalam hal ekonomi dan perdagangan cenderung meningkat semenjak Australia secara resmi menjadi salah satu mitra ASEAN tersebut.

Di seluruh wilayah Asia, Asia Tenggara berhasil membangun sebuah pengaruh besar, sehingga kawasan tersebut dianggap sebagai kawasan yang vital dan strategis. Asia Tenggara sendiri merupakan kawasan yang sangat dibutuhkan oleh Australia, karena Asia Tenggara merupakan kawasan penting dan vital untuk banyak kepentingan nasional Australia. Wilayah Asia Tenggara juga berfungsi sebagai sebuah pijakan pertama Australia menuju Asia. Ancaman apapun yang datang dari arah Asia, harus melewati Asia Tenggara terlebih dahulu sebelum mencapai Australia, Asia Tenggara ibarat sebuah benteng geografis dalam hal pertahanan keamanan Australia.⁵

³Zulkifli Hamid, 2002. *Sistem Politik Australia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 395

⁴Frank Frost, 2016. *Engaging the neighbours : Australia and ASEAN since 1974*, Australia: ANU

⁵Rio Akbar Pramanta, dkk. "Kemitraan Strategis Non-Zero Sum Game: Hubungan ASEAN-Australia dalam Konteks Geopolitik", *Indonesian Perspective*, Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2018, hal. 111-126.

Disamping itu, Asia Tenggara juga merupakan kawasan persaingan antara Australia dan Cina, Asia Tenggara menjadikan keduanya bersaing akan pengaruh siapa yang lebih kuat di kawasan tersebut. Cina yang terus membangun kekuatan strategisnya sendiri di wilayah tersebut, menuntut Australia untuk menyulap berbagai kepentingan yang bersaing. Australia pun ikut giat dalam berupaya memperlambat hubungan politik dan perdagangan di kawasan tersebut.⁶ Pada awal tahun 2018, diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Sydney, KTT ini menghasilkan kesepakatan kerja sama di bidang infrastruktur.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus untuk melihat apa motivasi Australia melakukan kerja sama infrastruktur dengan ASEAN tersebut.

KERANGKA TEORI

a. Perspektif: Neorealisme

Neorealisme pertama kali digagas oleh Kenneth Waltz melalui bukunya yang berjudul, “*Theory of International Politics*” pada tahun 1979. Menurut Waltz, dunia berada dalam hubungan-hubungan yang sistemik, dimana secara langsung atau tidak langsung sikap dan kebijakan suatu negara dipengaruhi oleh suatu sistem internasional yang terjadi.⁸ Perspektif neorealisme populer sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan periode Perang Dingin. Neorealisme muncul sebagai

⁶Hardi Alunaza SD, Sunarti, Ireng Maulana,

”Pengaruh Perbedaan Budaya dan Politik terhadap Dinamika Persaingan Kekuatan Ekonomi Australia dan China di kawasan Asia Pasifik”, *Jurnal Asia Pacific Studies*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2018, hal. 59-70.

⁷Graeme Dobell, “ASEAN and Australia go to the summit”, *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 72 No. 4, Mei 2018, hal. 314-321.

⁸Setia Pratama Erik, “Kepentingan Amerika Serikat dalam Melakukan Pivot to Asia di Kawasan Asia Timur”, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Andalas, 2016, hal. 1.

sebuah kritik terhadap pandangan realisme klasik.⁹

Ada empat asumsi dasar teori neorealisme, yang pertama yaitu sistem internasional diisi oleh negara (unit), yang membedakan tiap-tiap unit adalah kapabilitasnya, struktur dari sistem akan berubah jika distribusi kapabilitasnya juga berubah. Yang kedua adalah konsekuensi dari sistem internasional yang anarkis, yang menjadikan sebuah negara hanya bergantung pada dirinya sendiri atau yang dikenal juga dengan *self-help system*. Selanjutnya yang ketiga *self-help system* tersebut membuat negara selalu mencari cara untuk bertahan hidup yaitu dengan meningkatkan kapabilitasnya. Yang keempat, kompetisi tiap negara untuk meningkatkan kapabilitasnya akan menimbulkan dilema terhadap keamanan atau yang dikenal dengan istilah *security dilemma*.

b. Tingkat Analisis: Negara-bangsa

Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat analisis negara-bangsa. Menurut Mohtar Mas’oed, tingkat analisis merupakan analisa yang menekankan bahwa semua pembuat keputusan, dimana pun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Karena itu analisa yang menekankan pada variabel atau perbedaan antara perilaku sekelompok pembuat keputusan di suatu negara dengan sekelompok negara lain di negara lain dianggap sia-sia saja. Hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku negara-bangsa, oleh karenanya analisa para ilmuwan seharusnya ditekankan pada perilaku unit negara-bangsa, karena dalam hal ini, perilaku individu, kelompok, organisasi, lembaga dan proses perpolitikan mereka hanya akan diperhatikan sejauh perilaku mereka itu berkaitan dengan tindakan

⁹Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*, 2016, hal.84

internasional negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu politik luar negeri oleh suatu negara-bangsa sebagai suatu unit yang utuh adalah sebuah faktor yang menjadi kunci dalam penelitian disiplin Ilmu Hubungan Internasional.¹⁰

c. Teori *Balance of Power* dan Teori *Hedging*

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teori *balance of power* dan teori *hedging*. Waltz berpendapat bahwa hal yang dapat membuat sistem anarki stabil adalah perimbangan kekuatan (*balance of power*). *Balance of power* berarti tidak ada satu negara pun yang mendominasi dalam sistem. *Balance of power* adalah kondisi dimana stabilitas sistem yang ada terjaga. Menurut Waltz, dua hal yang menyebabkan *balance of power* dapat terjadi yaitu karena sistem itu adalah sistem yang anarki dan negara-negara dalam sistem tersebut ingin bertahan hidup. Untuk mencapai kondisi *balance of power*, terdapat dua jenis sarananya, yaitu *internal balancing* dan *external balancing*, *internal balancing* bisa dilakukan dengan meningkatkan kapabilitas/kemampuan ekonominya, meningkatkan kekuatan militer, atau mengembangkan sejumlah strategi, sedangkan *external balancing* bisa dilakukan dengan memperkuat dan memperbesar aliansi atau melemahkan lawan.

Di dalam teori *Balance of power* sendiri terdapat dua konsep, yakni *balancing* dan *bandwagoning*. *Balancing* adalah situasi dimana negara-negara dalam sistem akan berusaha untuk meningkatkan kapabilitasnya dan membentuk koalisi dengan negara-negara lemah demi menghadapi ancaman tersebut. Namun

ketika dalam koalisi *balancing* ini ada satu negara yang lebih mendominasi, maka negara lain akan memilih opsi *bandwagoning*.¹¹ *Bandwagoning* merupakan upaya kompromi dengan kekuatan pesaing untuk menghindari konflik, baik dalam bentuk memenuhi kepentingan pesaing atau membentuk aliansi dengan pesaing.¹²

Teori *balance of power* memandang negara selalu mencari upaya untuk bertahan hidup di tengah sistem internasional yang anarkis dengan mencari kekuatan agar selamat dari ancaman negara lain. Sehingga kompetisi dalam upaya memperebutkan kekuatan merupakan hal yang alami. Namun kompetisi ini dirasa menjadi tidak adil mengingat perbandingan kekuatan setiap negara berbeda-beda. Teori *balance of power* menilai bahwa dengan memperhatikan kekuatan fisik sebuah negara maka negara tersebut memiliki kekuatan yang besar dan dipastikan menjadi ancaman besar. Teori ini menjadi tidak sesuai dengan kondisi sejumlah negara. Dari pemikiran ini maka muncul teori *balance of threat*.

Teori *balance of threat* mematahkan anggapan teori *balance of power* yang menyebutkan bahwa negara akan selalu mengimbangi kekuatan dari negara lain yang lebih kuat darinya. *Balance of power* hanya melihat kekuatan, namun tidak menjelaskan mengapa ada negara yang tidak takut dengan negara yang memiliki kekuatan yang besar.

¹⁰Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. LP3ES. Jakarta. 1990. Hal. 41

¹¹Hanna Theresia Ruthania Alda Siahaan, "Pandangan Paradigma Neorealisme, Neoliberalisme, dan Konstruktivisme dalam Melihat Akar Konflik pada Konflik Perbatasan Djibouti-Eritrea di Daerah Ras Doumeira tahun 2008", Departemen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, 2013, hal. 5-8.

¹²Ian Montratama, Yanyan Mochamad Yani, "Bargaining: Revisi Teori Perimbangan Kekuatan dalam Hubungan Diplomasi Indonesia, Malaysia, Cina, dan AS", *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 2, No. 1, 2017, hal 53-73.

Dalam merespon kelemahan ini, Stephen M. Walt menganalisa kasus ini di dalam bukunya “*Origins of Alliances*”. Walt menentang konsep *balance of power*, dan menjelaskan bahwa negara tidak melakukan *balancing* berdasarkan *power*, tetapi dari ancaman yang diberikan negara yang dia anggap mengancam.¹³

Penulis menggunakan teori *balance of power*, dengan aktor yaitu Australia dan Cina, analisisnya adalah Australia tidak ingin adanya dominasi secara menyeluruh oleh Cina melalui *Belt and Road Initiative* di kawasan Asia Pasifik. Kondisinya, di kawasan Asia Pasifik Cina melalui kebijakan BRI-nya sudah sangat mendominasi sehingga membuat situasi *supply and demand* di bidang infrastruktur di Asia Pasifik bergantung seutuhnya kepada Cina. Dengan adanya kerja sama infrastruktur Australia dengan ASEAN ini membuat kondisi pasar di kawasan Asia Pasifik menjadi lebih seimbang.

Strategi alternatif dari *balancing*, *bandwagoning*, dan *buck-passing* di dalam kerangka teori *balance of threat* adalah strategi *hedging*. *Hedging* dilakukan oleh negara ketika negara tersebut merasa tidak yakin dengan intensi sumber ancamannya. Strategi ini memungkinkan negara menjalin hubungan dengan partner yang perilakunya tak dapat ditebak di masa mendatang.¹⁴

Kuik Cheng Chwee mendefinisikan strategi *hedging* merupakan perilaku pengimbangan kekuatan yang dilakukan melalui sejumlah kebijakan guna menghasilkan efek yang diharapkan dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian

dan resiko.¹⁵ *Hedging* dianggap sebagai metode cerdas bagi sejumlah negara dalam menentukan kebijakan luar negerinya. *Hedging* ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional sebuah negara dengan memanfaatkan rivalitas dua kekuatan besar. Untuk melaksanakan strategi *hedging*, tiap-tiap negara melakukan kebijakan yang beragam, selama hal tersebut masih berada di luar strategi *bandwagoning* atau *balancing* yang murni.

Evelyn Goh menjabarkan lebih jauh terkait dengan strategi *hedging* yang memiliki karakteristik fleksibel melalui perilaku strategi *indirect* atau biasa yang dikenal dengan *soft balancing*. Strategi *indirect* atau *soft balancing* berarti melakukan strategi keseimbangan dengan melakukan upaya untuk mengajak negara *great powers* untuk mengimbangi pengaruh dan perkembangan kekuatan negara secara kapabilitas pertahanan mengalami peningkatan militer serta memiliki potensi sebagai ancaman. Strategi ini dilakukan ketika negara tidak menerima dominasi pengaruh dari negara lain, dan lebih memprioritaskan pada proses keseimbangannya.

Strategi *hedging* juga meliputi strategi *enmeshing*. Strategi *enmeshing* merupakan upaya untuk membentuk sebuah kekuatan berdasarkan kepentingan nasional negara tersebut yang berpangkal pada adanya proses *engagement*. Tujuan dari strategi ini agar lebih menjamin keadaan pertahanan dan stabilitas kawasan ataupun global.¹⁶

¹³Vincent Jansen, “Dampak Kompetisi AS-China di Laut China Selatan Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia”, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, 2017, hal. 20-27.

¹⁴Aisha R. Kusumasomantri, “Strategi Hedging Indonesia Terhadap Klaim Teritorial Cina di Laut Cina Selatan”, *Jurnal Politik Internasional*, Vol. 17 No. 1, Mei 2015, hal 48-80.

¹⁵Kuik Cheng Chwee, “The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore’s Response to a Rising China”, *Contemporary Southeast Asia a Journal of International and Strategic Affairs*, Vol. 30 No.2, 2010, hal 159-185.

¹⁶Evelyn Goh, “Meeting the China Challenge: The U.S in Southeast Asian Security Strategies”, *Journal of Policy Studies: Monograph* No.16.

Penulis menggunakan teori *hedging* yang merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh Australia dalam menyeimbangkan pengaruh Cina di kawasan Asia Pasifik melalui kerja samanya dengan ASEAN di bidang infrastruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Strategi Indo-Pasifik dari Kebijakan Kerja Sama Infrastruktur Australia dan ASEAN

Konsep Indo-Pasifik pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 2007 oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada forum Quadilateral Security Dialogue (QSD). Di tahun yang sama, Guurpet S. Kurana sebagai seorang *Marine Strategist* dan Direktur Eksekutif *The New Delhi National Marine Foundation* juga menggunakan kata “*Indo-Pacific Strategy*”. Semenjak saat itu peta strategis Indo-Pasifik mengalami berbagai perubahan arti dan pemaknaan terutama dengan munculnya kebijakan reformasi dan keterbukaan Cina pada tahun 1980-an.¹⁷ Kemudian pada 12 November 2017, konsep ini diungkapkan kembali oleh Amerika Serikat (AS) dalam QSD di Manila dengan mengangkat Indo-Pasifik sebagai istilah baru yang tidak hanya mengganti Asia-Pasifik secara penyebutan maupun cakupan geografis, namun juga perluasan aktor, kekuasaan hingga arsitektur keamanan kawasan.¹⁸

Pasca lengsernya Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama, tren perubahan arah kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump dari “Asia-Pasifik” ke “Indo-Pasifik” tersebut secara tersirat juga dinilai sebagai ekspansi dan revisi “*Asia-Pacific*

¹⁷V.L. Sinta Herindrasti, “Fenomena Indo-Pasifik dan Diplomasi Indonesia”, *Jurnal Asia Pacific Studies*, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2019, hal 43-51.

¹⁸SyahraniAlby, Umi Oktyari Retnaningsih,

Yusnarida Eka Nizmi, Loc.cit

rebalancing strategy” pada pemerintahan sebelumnya menjadi “Indo-Pasifik” disebabkan karena AS merasakan adanya tantangan yang terus tumbuh dari Cina dan bertekad untuk mempertahankan supremasi global dengan terus meningkatkan kehadirannya di Indo-Pasifik dan meningkatkan kerja sama strategis dengan mitra segi empatnya, yakni Jepang, Australia dan India.¹⁹

Hingga saat ini, Indo-Pasifik menjadi perbincangan terutama sejak Trump melakukan kunjungan pertamanya sebagai presiden ke Asia dan mengemukakan sebuah strategi untuk Kawasan Indo-Pasifik dengan strategi “*a Free and Open Indo-Pacific*”. Kebijakan tersebut disorot secara global pada tahun 2017. Presiden Donald Trump menyampaikan *Free and Open Indo-Pacific* dalam pidatonya di pertemuan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) di Vietnam tepatnya pada 12 November 2017. Trump menyatakan bahwa kebijakan yang sedang diupayakannya itu nantinya tidak hanya akan penting bagi Amerika Serikat saja tetapi juga akan bermanfaat dan penting bagi negara-negara yang berada dalam cakupan kawasan Indo-Pasifik.

Prinsip yang ditekankan dalam kebijakan *Free and Open Indo-Pacific* sendiri adalah prinsip bebas (*free*) dan terbuka (*open*). Maksud dari prinsip bebas disini adalah bahwa Amerika Serikat menginginkan negara-negara di Indo-Pasifik dapat terbebas dari koersi atau paksaan sehingga kepentingan masing-masing negara itu dapat mereka capai dan wujudkan di kawasan. Kemudian Amerika

¹⁹Pradipta Nindyan Saputra dan Arfin Sudirman, “Pengembangan Konsep “Indo-Pasifik”: Sebuah Konstruksi Geopolitik Indonesia di Kawasan Melalui ASEAN”, *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 6 No. 2, 2020, hal. 214-224.

Serikat juga menginginkan masyarakat yang ada di cakupan wilayah Indo-Pasifik dapat bebas secara berkelanjutan ke arah yang lebih maju, dalam hal ini adalah dapat mewujudkan *good governance*. Sedangkan keterbukaan atau *open*, yang dimaksudkan adalah adanya upaya untuk membuka atau membuat komunikasi jalur laut juga jalur udara dan secara khusus adalah jalur laut, sebab jalur ini diibaratkan sebagai nadinya kawasan Indo-Pasifik. Kemudian, Amerika Serikat juga ingin mendorong pembangunan infrastruktur regional dan peningkatan investasi melalui kebijakan strategi *Free and Open Indo-Pacific* tersebut.²⁰

Disamping itu, Australia pada Buku Putih pertahanannya tahun 2013 juga telah menyebutkan secara jelas terciptanya sebuah “*Indo-Pacific Strategic Arc*” yang mengharuskan Australia mengantisipasi kebangkitan kekuatan Cina dan mengimplementasikan strategi yang menitikberatkan interkoneksi lautan Hindia dan Pasifik melalui kawasan Asia Tenggara, dengan kata lain Australia menyebut Asia Tenggara sebagai pusat geografis dari konsepsi Indo-Pasifik. Cakupan perangkat ASEAN seperti Asean Regional Forum (ARF) dan East Asia Summit (EAS) menjadikan ASEAN sebagai instrumen regional yang amat berpengaruh dalam konsepsi Indo-Pasifik. Negara-negara kunci dalam konsepsi Indo-Pasifik telah menyatakan pentingnya *engagement* terhadap ASEAN.²¹

Bagi negara-negara anggota ASEAN sendiri, konsep Indo-Pasifik bukan merupakan konsep baru, sebab ASEAN sebelumnya telah mendorong konsep kerja sama dengan cakupan yang lebih komprehensif dengan menggandeng

negara-negara yang memiliki kekuatan besar. Salah satu hal yang menjadikan konsep Indo-Pasifik menjadi penting bagi ASEAN adalah bahwa letak negara-negara anggotanya yang berada di Asia Tenggara dan tepat berada pada titik transisi antara Samudera Hindia dan Pasifik. ASEAN sebagai organisasi yang menaungi negara-negara di Asia Tenggara dikatakan menyambut sejumlah kekuatan besar di Indo-Pasifik untuk “bersaing secara konstruktif” (*constructively competing*) untuk menyediakan perdagangan, investasi, teknologi dan hubungan militer bagi negara anggota ASEAN.

Kehadiran dan peran ASEAN melalui prinsip netralitas dan sentralitasnya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Kondisi yang aman dan stabil dari segi pertahanan di kawasan Indo-Pasifik akan mendorong terealisasinya pembangunan ekonomi di kawasan yang berkelanjutan serta terjaganya kondisi yang aman yang akan memudahkan terwujudnya pembangunan negara.²²

Kerja sama infrastruktur yang dijalin oleh Australia dengan ASEAN pada tahun 2018 ini merupakan salah satu perwujudan dari strategi Indo-Pasifik yang tertuang di dalam Buku Putih pertahanannya tahun 2013, Australia memandang ASEAN sebagai strategi yang dapat menjadi penyeimbang serta mengantisipasi kekuatan Cina yang semakin asertif di kawasan Asia Pasifik.

B. Analisis Strategi *Soft Balancing* dari Kebijakan Kerja Sama Infrastruktur Australia dan ASEAN

Soft balancing merupakan salah satu bentuk dari strategi *hedging*, inti dari strategi kebijakan ini adalah melakukan

²⁰SyahroniAlby, Umi Oktyari Retnaningsih, YusnaridaEkaNizmi, Loc.cit

²¹Muhamad Jaki Nurhasya, “Konsepsi Indo-Pasifik sebagai Sebuah Strategi Ketahanan Politik Luar Negeri Indonesia”, *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 33, Maret 2018 hal. 65-73.

²²Syahroni Alby, Umi Oktyari Retnaningsih,

strategi keseimbangan namun bukan berarti membangun aliansi atau *treaty* melainkan hanya melakukan upaya mengajak negara kuat sebagai jaminan untuk mengimbangi pengaruh dari perkembangan kekuatan suatu negara yang secara kapabilitas pertahanan mengalami peningkatan dan berpotensi menjadi ancaman. Strategi *soft balancing* dilakukan ketika suatu negara ingin memprioritaskan proses keseimbangannya dengan mengkombinasikan kekuatan ekonomi, diplomasi, dan institusional dan tidak menginginkan adanya dominasi pengaruh dari negara lain. Menurut Evelyn Goh, strategi *soft balancing* dilakukan dengan cara menghadirkan kekuatan *superpower* untuk turut menjamin keamanan regional, namun hanya sebatas sebagai kekuatan stabilisator guna menghadapi apabila terjadi kemungkinan-kemungkinan buruk.²³

Kondisi politik internasional yang sedang memanas di Kawasan Asia Pasifik membuat Australia berada dalam posisi yang sulit. Amerika Serikat merupakan sekutu Australia dari lama yang telah memegang peranan penting dalam kebijakan pertahanan dan keamanan Australia, sedangkan Cina merupakan pemain baru namun juga memegang peranan penting dalam perekonomian Australia. Di posisi yang sulit seperti ini, banyak yang berpendapat bahwa pada akhirnya Australia harus memilih salah satu di antara kedua negara tersebut. Namun faktanya, Australia tidaklah harus memilih salah satu. Seperti yang sudah dilakukan di bawah Pemerintahan Perdana Menteri John Howard sebelumnya, penerapan strategi *hedging* sangat mungkin di aplikasikan ulang dalam kondisi ini. Dengan adanya kompetisi antara dua negara besar mestinya tidak hanya dipandang sebagai ancaman saja, namun hal ini sebenarnya justru merupakan kesempatan yang sangat baik

²³Evelyn Goh, Loc. Cit

bagi Australia untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai negara *middle power* agar bisa menyatukan kepentingan kedua negara tersebut.²⁴ Dalam konteks ini, bentuk dari *soft balancing* Australia adalah dengan menghadirkan kekuatan *super power* lain, yaitu sekutunya sendiri, yakni Amerika Serikat.

Hubungan Australia dengan Amerika Serikat sendiri dimulai sebelum Australia berdiri sebagai negara berdaulat yaitu pada saat keduanya terlibat dalam penanganan pemberontakan Boxer tahun 1898 di Cina. Untuk semakin memperkuat hubungan militer antara Amerika Serikat dan Australia dibentuklah pakta pertahanan bersama, dan pada tahun 1951 dibentuk Australian, New Zealand and United States (ANZUS) di San Fransisco. Melalui kerja sama militer Australia dan Amerika Serikat dalam ANZUS menunjukkan pentingnya peran Amerika Serikat sebagai pengawal pertahanan dan keamanan Australia dan kawasan Asia Pasifik.²⁵

Berdasarkan sikap-sikap yang ditunjukkan Australia tersebut, maka dapat dikatakan Australia menggunakan strategi *hedging* yang diwujudkan dalam bentuk strategi *soft balancing* yang diimplementasikan melalui kebijakan kerja sama infrastrukturnya dengan ASEAN pada tahun 2018 tersebut. Kerja sama ini dimaksudkan untuk menghalangi dominasi pasar oleh Cina dalam bidang infrastruktur di kawasan Asia Pasifik, kerja sama infrastruktur Australia dengan ASEAN ini menciptakan persaingan baru, sehingga aktor yang berpengaruh tidak lagi hanya Cina semata, Australia yang bersekutu dengan Amerika Serikat dan kemudian melakukan kerja sama infrastruktur dengan

²⁴Syasya Yuania Fadila Mas'udi, "Analisis Dilema Aliansi Australia", *Jurnal PIR*, Vol.4 No. 2, Februari 2020, hal 190-200.

²⁵Khairunnisa, "Kebijakan Militer Amerika Serikat Dikawasan Asia Pasifik 2009-2012", *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol .1 No.3, 2013.

ASEAN ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan yang ideal di kawasan Asia Pasifik. Tidak hanya itu, Australia juga menggunakan strategi *hedging* untuk memperoleh keuntungan yang lebih kongkrit dalam dimensi ekonomi, politik dan militernya.

KESIMPULAN

Australia dan Asia Tenggara merupakan kawasan yang berada di wilayah Asia Pasifik. Australia memiliki letak geografis yang berdekatan dengan negara-negara di Pasifik Selatan dan Asia Tenggara. Letak geografis Australia yang berada di dekat negara-negara dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tersebut menciptakan kedekatan yang mengakibatkan adanya integrasi yang terjalin antara Australia dengan ASEAN.

Asia Tenggara berhasil membangun sebuah pengaruh besar, sehingga kawasan tersebut dianggap sebagai kawasan yang vital dan strategis. Asia Tenggara sendiri merupakan kawasan yang sangat dibutuhkan oleh Australia, karena Asia Tenggara merupakan kawasan penting dan vital untuk banyak kepentingan nasional Australia. Disamping itu, Asia Tenggara juga merupakan kawasan persaingan antara Australia dan Cina, Asia Tenggara menjadikan keduanya bersaing akan pengaruh siapa yang lebih kuat di kawasan tersebut.

Munculnya kekuatan Cina menciptakan kekhawatiran Australia, Australia sebagai negara *middle power* yang memiliki posisi yang penting di kawasan sehingga Australia merasa perlu untuk menjaga stabilitas keamanan di Asia Pasifik. Kebangkitan Cina di kawasan Asia Pasifik sendiri menjadi dorongan Australia untuk meningkatkan kembali perannya di kawasan.

Kerjasama infrastruktur yang dijalin oleh Australia dengan ASEAN pada tahun 2018 ini merupakan salah satu perwujudan dari strategi Indo-Pasifik yang tertuang di dalam Buku Putih pertahanannya tahun 2013, Australia memandang ASEAN sebagai strategi yang dapat menjadi penyeimbang serta mengantisipasi kekuatan Cina yang semakin asertif di kawasan Asia Pasifik.

Selain itu, Kerjasama Australia dengan ASEAN dan di bidang infrastruktur ini merupakan implementasi dari strategi *hedging*-nya Australia. Australia menggunakan strategi *hedging* yang diwujudkan dalam bentuk strategi *soft balancing*. Dalam hal ini, kerjasama infrastruktur Australia dengan ASEAN tersebut dimaksudkan untuk menghalangi dominasi pasar oleh Cina dalam bidang infrastruktur di kawasan Asia Pasifik, kerjasama infrastruktur ini akan menciptakan persaingan baru, sehingga aktor yang berpengaruh tidak lagi hanya Cina semata, Australia yang bersekutu dengan Amerika Serikat dan kemudian melakukan kerjasama infrastruktur dengan ASEAN ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan yang ideal di kawasan Asia Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dugis, Vinsensio. 2016. *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.
- Frost, Frank. 2016. *Engaging the neighbours : Australia and ASEAN since 1974*, Australia: ANU Press The Australian National University.
- Hamid, Zulkifli. 2002. *Sistem Politik Australia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* Revisi. Jakarta: LP3ES.

Jurnal:

- Alby, Syahroni, Umi Oktyari Retnaningsih, Yusnarida Eka Nizmi, "Strategi ASEAN Menghadapi Kekuatan Amerika Serikat dan China di Kawasan Indo-Pasifik", *Journal Publicuho*, Vol. 4 No. 1 (February-April 2021, hal. 27-38)
- Chwee, Kuik Cheng, "The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China", *Contemporary Southeast Asia a Journal of International and Strategic Affairs*, Vol. 30 No.2, (2010, hal 159-185)
- Dobell, Graeme, "ASEAN and Australia go to the summit", *Australian Journal of International Affairs*, Vol.72, No. 4 (2018, hal. 314-321)
- Goh, Evelyn, "Meeting the China Challenge: The U.S in Southeast Asian Security Strategies", *Journal of Policy Studies: Monograph No.16*. (2005)
- Herindrasti, V.L. Sinta, "Fenomena Indo-Pasifik dan Diplomasi Indonesia", *Jurnal Asia Pacific Studies*, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2019, hal 43-51)
- Khairunnisa, "Kebijakan Militer Amerika Serikat Di kawasan Asia Pasifik 2009-2012", *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol .1 No.3, (2013)
- Kusumasomantri, Aisha R. "Strategi Hedging Indonesia Terhadap Klaim Teritorial Cina di Laut Cina Selatan", *Jurnal Politik Internasional*, Vol. 17 No. 1, (2015, hal 48-80)
- Mas'udi, Syasya Yuania Fadila, "Analisis Dilema Aliansi Australia", *Jurnal PIR*, Vol.4 No.2, (Februari 2020, hal 190-200)
- Montratama, Ian dan Yanyan Mochamad Yani, "Bargaining: Revisi Teori Perimbangan Kekuatan dalam Hubungan Diplomasi Indonesia, Malaysia, Cina, dan AS", *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 2, No. 1 (2017, hal 53-73)
- Nurhasya, Muhamad Jaki, "Konsepsi Indo-Pasifik sebagai Sebuah Strategi Ketahanan Politik Luar Negeri Indonesia", *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 33, (Maret 2018 hal. 65-73)
- Pramanta, Rio Akbar dkk. "Kemitraan Strategis Non-Zero Sum Game: Hubungan ASEAN-Australia dalam Konteks Geopolitik", *Indonesian Perspective*, Vol. 3 No. 2, (Juli-Desember 2018, hal. 111-126)
- Saputra, Pradipta Nindyan dan Arfin Sudirman, "Pengembangan Konsep "Indo-Pasifik": Sebuah Konstruksi Geopolitik Indonesia di Kawasan Melalui ASEAN", *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 6 No. 2, (2020, hal. 214-224)
- SD, Hardi Alunaza, Sunarti, Ireng Maulana, "Pengaruh Perbedaan Budaya dan Politik terhadap Dinamika Persaingan Kekuatan Ekonomi Australia dan China di kawasan Asia Pasifik", *Jurnal Asia Pacific Studies*, Vol. 2 No. 1, (2018, hal. 59-70)
- Triwahyuni, Dewi, "Signifikansi Kawasan Asia Tenggara dalam Kepentingan Amerika Serikat", *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 9 No. 1, (hal 35-37)

Skripsi:

- Erik, Setia Pratama, "Kepentingan Amerika Serikat dalam Melakukan Pivot to Asia di Kawasan Asia Timur", Departemen Hubungan

- Internasional, Univeritas Andalas, 2016.
- Jansen, Vincent, “Dampak Kompetisi AS-China di Laut China Selatan Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia”, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, 2017.
- Siahaan, Hanna Theresia Ruthania Alda, “Pandangan Paradigma Neorealisme, Neoliberalisme, dan Konstruktivisme dalam Melihat Akar Konflik pada Konflik Perbatasan Djibouti-Eritrea di Daerah Ras Doumeira tahun 2008”, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, 2013.